

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sesuai dengan berlangsungnya penerapan otonomi daerah, membina dan menerapkan kebijakan berdasar pada undang-undang yang masih berlajalan di pemerintah daerahnya masing-masing. Kewenangan tersebut diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerahnya dari kebijakan pemerintah pusat. UU otonomi daerah memberikan wewenang pengelolaan pemerintah daerah dengan makin lebar, jelas serta bertanggung jawab. Dengan masih berjalannya otonomi daerah mempunyai peran supaya pada tiap daerah dapat semakin berkembang, sejahtera, mandiri serta bisa mengimplementasikan pemerintah daerah untuk menjadikan semakin sejahtera pada warga pada daerah itu (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada PP 5 No.105 Tahun 2000 mencantumkan standar pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan secara tertib, transparan, efektif, efisien serta bisa mempertanggungjawabkan berdasarkan asas keadilan serta kepatuhan. Dengan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*) pengukuran kinerja sangat menjadi salah satu cara faktor utama. Hal tersebut, juga harus didukung dengan karakteristik operasional organisasi. Perbedaan kegiatan tersebut memiliki arti fungsi yang berbeda, dapat mencakup penilaian bagi indikator dan ukuran kinerja masing-masing pemda. Pemanfaatan atas hal tersebut yaitu dalam mengkuantifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional kegiatan dengan mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirancang (Mahsun, 2019).

Tujuan lain dari penyusunan laporan keuangan adalah menghasilkan pelaporan yang akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan landasan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tujuan utama dalam reformasi sektor publik. Prinsip akuntabilitas yang menjadi landasan awal yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa seiring pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara terbuka kepada beberapa pihak yang bersangkutan pada penerapan kebijakan tersebut (Bappenas, 2002). Pemeliharaan dana publik

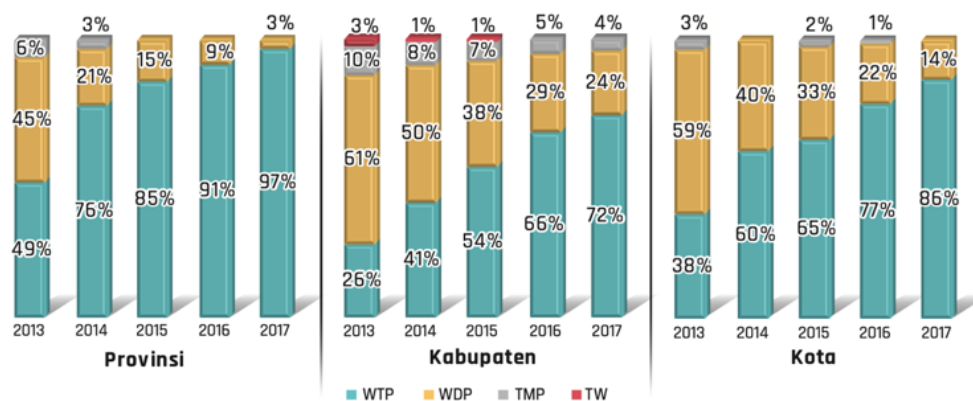
dengan penyajian tepat waktu dengan melakukan pemeriksaan (audit) merupakan kriteria dari akuntabilitas keuangan. Pertanggungjawaban kebijakan yang diikuti melahirkan suatu kepercayaan pada entitas pelaporan untuk mendapatkan pencapaian tujuan setiap periodiknya. Pada sektor pemerintah, pengertian akuntabilitas publik merupakan penjelasan informasi dan *disclosure* yang menggambarkan pada aktivitas kegiatan finansial maupun nonfinansial pemerintah yang mencakup pusat maupun daerah terhadap beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengetahui pelaporan tersebut.

Pada UU. Nomor 17 Tahun 2003 Terkait Keuangan Negara Pasal 31 tertulis mengenai pemerintah daerah dalam aktualisasi APBD yang diterima oleh DPRD berbentuk sebagai laporan keuangan yang sudah di terima dari BPK, dengan waktu 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Kriteria umum sebuah laporan keuangan dapat mempersembahkan informasi terkait kinerja keuangan, arus kas, posisi keuangan, realisasi anggaran sebuah entitas pelaporan yang memiliki manfaat kepada seluruh pemakai untuk meringkas, penyajian secara full disclosure pada halaman muka maupun CaLK dan mengevaluasi hasil akhir terkait alokasi sumber daya tertera dalam PP No.71 Tahun 2010 (Priharjanto & Wardani, 2017).

LKPD merupakan dokumen pembanding untuk menilai kinerja keuangan yang nantinya akan dilakukan audit dari BPK dalam melakukan pengujian kelayakan laporan keuangan itu (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menggambarkan suatu capaian yang perlu dibanggakan, tetapi hal tersebut bukan merupakan pertanggung jawaban utama dalam pemda yang menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat. Karena hal tersebut, masih ditemukan banyaknya fraud atau kecurangan yang berdampak pada kerugian daerahnya (Amirsyah, 2019).

Berdasarkan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) jumlah entitas LKPD mencakup atas 34 Provinsi 396 Kabupaten serta 93 Kota. Sementara pemda yang telah diaudit BPK adalah sebanyak 34 Provinsi 15 Kabupaten serta 93 Kota. IHPS BPK SEMESTER I (2018) menunjukkan perkembangan opini terhadap LKPD selama 5 tahun terakhir (2013-2017) mengalami perbaikan. Pada pemprov, pencapaian opini WTP bertambah dari 31

menjadi 33 LKPD. Pemerintah kabupaten yang bertambah dari 275 menjadi 298 LKPD, dan pada pemkot dari 72 menjadi 80 LKPD. Kemajuan opini selama lima tahun belakang bisa diketahui dalam Grafik 1 berikut ini.



Sumber : IHPS I BPK 2018

Grafik 1. Perkembangan Opini Tahun 2013-2017

Ciri-ciri permasalahan masih tercatatnya opini WDP yaitu kelemahan dari sistem pengendalian internal dan ketidapatuhan peraturan perundangan (Redaksi, 2019). UU RI No.15 Tahun 2004 melampirkan arti penyelidikan sebagai proses, analisa serta penilaian yang tidak terikat dalam kepentingan lainnya, berpandang secara objektif, dan menerapkan sikap profesionalisme suatu pemda dalam pengelolaan keuangan sebagai tanggungjawabnya (Mappiasee, 2018).

Tabel 1. Opini Audit Provinsi Jawa Timur dan Papua 2013-2017  
Perkembangan Opini Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur  
2013-2017

Entitas Pemerintah Daerah	OPINI AUDIT				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Sidoarjo	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
Kab. Situbondo	WDP	WTP DPP	WDP	WTP	WTP
Kab. Sumenep	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Kota Madiun	WDP	WTP DPP	WTP	WDP	WTP
Kota Malang	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP

Perkembangan Opini Kab/Kota Di Provisni Provinsi Papua 2013-2017

Entitas Pemerintah Daerah	OPINI AUDIT				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Paniai	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
Kab. Asmat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Jayapura	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Jayawijaya	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Jayapura	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS I BPK 2018

Luna Nur Amalina, 2020

*PENGARUH BELANJA DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, OPINI DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Pada tabel 1. merupakan contoh tabel daftar Opini LKPD 2013-2017 pada Provinsi Jawa Timur dan Papua. Referensi data hanya terlampir 5 Kabupaten/Kota untuk beberapa sampel untuk mewakili suatu daerah. Peneliti membandingkan ke dua provinsi tersebut dikarenakan menurut EKPPD Tahun 2016 Secara Nasional, Jawa Timur termasuk provinsi yang punya prestasi tertinggi nasional dengan ranking urutan pertama. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan kabupaten yang Berprestasi paling tinggi secara nasional dengan peringkat urutan pertama. Sedangkan, Papua termasuk provinsi yang berprestasi paling rendah secara nasional dengan nomor peringkat 33. Kabupaten Paniai juga merupakan kota yang berprestasi paling rendah secara nasional dengan peringkat 397.

Selain perkembangan terhadap opini pada masing-masing daerah, terdapat permasalahan lain yang terkait dengan 3 aspek E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas). Sesuai dengan Laporan Pemeriksaan BPK Semester Pertama 3 aspek E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) ada 5 ketidakefektifan masalah di Provinsi dan 7 di Kabupaten yang menyebabkan kerugian regional sebesar Rp153,83 juta. Menurut Laporan Pemeriksaan BPK Semester Kedua 2017, sebanyak 479 Pemerintahan Laporan Pemeriksaan dan 181 Pemerintah Daerah. Laporan Pemeriksaan tentang Pemeriksaan Kinerja menghasilkan 1,796 penemuan. Temuan ini memiliki 2.176 masalah. Masalah tersebut terdiri dari 18 ekonomi masalah, 3 masalah inefisiensi, dan 2.056 masalah infektivitas. Ini membuktikan bahwa 94% masalah didasarkan pada kurangnya efektivitas dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena itu, permasalahan yang berhubungan kepada kurangnya efektivitas keuangan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2017 menghasilkan 2.098. Beberapa menemukan yang mengakibatkan kurangnya efektivitas adalah kurangnya standar atau pedoman, kurangnya pekerjaan dan fungsi koordinasi yang menghasilkan inspektorat yang tidak efektif tata kelola, mekanisme dan prosedur yang diterapkan yang belum sesuai dengan standar, kekurangan manusia sumber daya dalam aspek pendidikan, bukan implementasi prinsip-prinsip dasar, kurangnya pencapaian target, dan lainnya faktor yang berhubungan dengan pemeriksaan keefektifan (IHPS BPK, 2014).

Perbedaan pemda di setiap daerahnya memiliki ciri khas yang dapat dikategorikan "*special*" dalam penghasilannya. Terlihat dari keunggulan suatu pemda yang dapat menghasilkan *output* dari segi keuangannya maupun kesejahteraan masyarakatnya. Pemaksimalan urusan pemda yang menjadi penopang utama dalam asas otonomi daerah dapat berperan pada hasil keuangannya. Pendukung dari potensi tersebut yang sangat berpengaruh memiliki perbedaan suatu daerah dari daerah lainnya terutama dari kekayaan suatu daerah yaitu berasal dari PAD yang diperoleh bersumber atas pajak daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Alpi & Ramadhan, 2018).

Signifikansi pada penguatan dana mempengaruhi peningkatan pada aspek kemandirian suatu daerah secara optimal, bentuk khusus dalam kegiatan pelayanan publik dan debirokrasi tata pemerintahan. Namun sayangnya, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi sisi optimalisasi kualitas belanja APBD sampai saat ini masih mendominasi dilakukan pembahasan secara lebih lanjut. Aspek tersebut dapat di kategorikan mengenai daerah yang seharusnya dapat mengelompokkan APBD di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi *homework* fokus permasalahan di aspek pemerintah daerah. Dari faktor lain, pemda juga terus memperbaiki dari bidang penganggaran, tidak lain dalam pemanfaatan teknologi dan informasi demi menciptakan optimalisasi (Haryanto, 2020).

Berdasarkan hasil riset sebelumnya, kinerja pemerintah bisa terpengaruhi dari bermacam faktor, yaitu; faktor keuangan serta lingkungan. Beberapa hasil menjabarkan pengertian karakteristik pemerintah dengan beragam ukuran. Penelitian ini punya tujuan guna membagikan hasil bagaimana pengaruh variabel Belanja Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Opini dan Temuan Audit BPK kepada Kinerja Pemerintah Daerah. Ketidakterkaitan hasil penelitian kepada peneliti sebelumnya mengenai variabel Belanja Daerah, Belanja Modal, Tingkat Kekayaan Daerah, Opini dan Temuan Audit kepada kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Perbedaan penelitian pengaruh belanja daerah kepada kinerja pemerintah daerah yaitu menurut Andani dan Respati (2019) mengenai belanja daerah punya

pengaruh positif kepada kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Muid (2014) mengemukakan mengenai belanja daerah tidak punya pengaruh kepada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian pengaruh tingkat kekayaan daerah kepada kinerja pemerintah daerah yaitu menurut Qowi, Jatmiko, dan Prabowo (2017) mengenai tingkat kekayaan daerah punya pengaruh positif kepada kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berbeda dengan riset Utama, Evana, dan Gamayuni (2019) mengenai tingkat kekayaan daerah tidak punya pengaruh kepada kinerja pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian pengaruh opini audit kepada kinerja pemerintah daerah yaitu menurut Susanti, Amir, dan Tiswiyanti (2016) mengenai opini audit tidak punya pengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan riset Sutopo dan Siddi (2018) bahwa opini audit punya pengaruh positif kepada kinerja pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian pengaruh temuan audit kepada kinerja pemerintah daerah yaitu menurut Susanti et al. (2016) berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah daerah berbeda dengan riset Artha, Basuki, dan MT (2015) mengenai temuan audit tidak punya pengaruh kepada kinerja pemerintah daerah.

Keberhasilan suatu pemerintahan daerah akan tercermin dari peringkat serta status kinerja atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), opini yang diberikan oleh BPK dan temuan audit, menghasilkan birokrasi pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi dan pemerintah yang akuntabel dan bersih. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang tercantum dalam PP No. 6 Tahun 2008 Keputusan Mendagri mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan satu diantara penilaian pengelolaan pemerintahan daerah berbentuk sebagai EKPPD merupakan hal yang unik untuk ditelaah lebih dalam. EKPPD tersebut memakai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang memakai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Mengacu pada fenomena dan penelitian-penelitian sebelumnya, memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah daerah Indonesia masih dianggap sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini memakai ikhisar hasil penyelidikan BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penggunaan data periode terbaru memberikan harapan bisa membagikan informasi yang memiliki keterkaitan dalam periode terbaru mengenai kinerja pemerintah daerah.

Meskipun begitu masih minim penelitian yang melakukan pengujian pengaruh belanja daerah, tingkat kekayaan daerah, opini serta temuan audit BPK kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini direkomendasikan oleh penelitian Aswar (2019) mengenai penambahan variabel independen yaitu belanja daerah. Berdasarkan eksplikasi diatas, peneliti terpicat agar melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Belanja Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Opini Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Bersumber dari uraian diatas, sehingga rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Apakah Belanja Daerah punya pengaruh signifika kepada Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia?
2. Apakah Tingkat Kekayaan Daerah punya pengaruh signifikan kepada Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia?
3. Apakah Opini Audit punya pengaruh signifikan kepada Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia?
4. Apakah Temuan Audit punya pengaruh signifikan kepada Kinerja Pemerintah Daerah di Indoensia?

## **I.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini mempunyai batasan-batassan yakni seperti berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di semua kabupaten/kota di Indonesia.
2. Penelitian dilaksanakan di pemerintah daerah yang mempunyai laporan keuangan yang lengkap dan telah diperiksa oleh BPK.
3. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah yang ditampilkan pada EKPPD pada tahun 2017.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Bersumber atas permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Belanja Daerah kepada Pemerintah Daerah di Indonesia.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah kepada Pemerintah Daerah di Indonesia.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Opini Audit kepada Pemerintah Daerah di Indonesia.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Temuan Audit kepada Pemerintah Daerah di Indonesia.

#### **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil peneltian ini bisa membagikan manfaat yakni seperti berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi ilmiah pada penelitian sebelumnya mengenai variabel independen yaitu belanja daerah dari Aswar (2019) dan tambahan bukti empiris yang berkaitan dengan belanja daerah, tingkat kekayaan daerah, opini audit serta temuan audit kepada kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

2) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini bisa jadi sebuah literatur baru guna riset berikutnya. Melalui masih terbatas riset dalam sektor publik di Indonesia.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Penulis

Diharapkan di penelitian ini bisa membagikan manfaat guna makin memahami serta melakukan pengaplikasian terodi yang telah didapatkan, dapat langsung melakukan penerapan teori pada akuntansi sektor publik. Di samping itu, penelitian ini bisa pula disajikan



pengalaman bermanfaat untuk melakukan perumusan, melakukan analisa serta melakukan pemecahan permasalahan dalam mengaplikasikan keilmuan yang diperoleh sepanjang menuntut ilmu pada perguruan tinggi.

## 2) Bagi Pemerintah

Kegiatan ini dimanfaatkan selaku materi penilaian serta informasi untuk pemerinah dalam melakukan kajian sistem kinerja pemerintah daerah supaya bisa melakukan penekanan angka kecurangan yang berlangsung di pemerintah daerah mengenai prestasi kerja yang dijalankan dari pemerintah daerah di Indonesia.

## 3) Bagi Pembaca

Penulisan ini bisa meningkatkan wawasan serta keilmuan untuk pembaca mengenai kinerja pemerintah daerah. Lalu, diinginkan bisa membagikan kontribusi kepada peningkatan referensi Akuntansi Sektro Publik (SAP) utamanya dalam permasalahan yang berlangsung kepada kinerja pemerintah daerah yang kemudian bisa menjadi sebuah referensi untuk riset lainnya.